



TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: TINJAUAN
HISTORIS DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Moh Romzi ¹, Shobihatul Fitroh Noviyanti ^{*2}, Juri Wahananto ³, Fitriani ⁴

^{1,2} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
³ Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, Indonesia
⁴ Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

¹✉ auqilmirza@gmail.com, ²✉ shobihanoviyanti@gmail.com, ³✉ juriwahananto3@gmail.com, ⁴✉ fitri.angel91@gmail.com

Abstract	History Articles
<p><i>This study aims to analyze the historical development of Islamic education in Indonesia and the policy dynamics that have shaped its transformation from the pre-colonial period to the early post-independence era. The main focus of this research is the role of Islamic educational institutions such as surau, pesantren, and madrasah in forming the religious, social, and intellectual identity of Indonesian Muslim society amid socio-political change. This study employs a qualitative approach using library research methods. Data were collected through a systematic review of relevant academic literature, including scholarly books, peer-reviewed journal articles, historical documents, and policy publications related to Islamic education and educational governance. The collected data were analyzed using a descriptive-qualitative method with a historical perspective to identify patterns of development, continuity, and transformation in Islamic education across different historical phases. The findings indicate that Islamic education in Indonesia has evolved adaptively through continuous interaction between local traditions, religious authority, and state policies. During the colonial period, Islamic education functioned as a form of cultural resistance against discriminatory colonial education systems. In the post-independence period, Islamic education particularly madrasahs experienced increased state recognition through institutional development, curriculum integration between religious and general subjects, and national standardization efforts. This study concludes that Islamic education in Indonesia represents a dynamic and resilient educational system capable of transformation without losing its core religious values. The implications of this research highlight the importance of inclusive, context-sensitive educational policies to strengthen the quality and sustainability of Islamic education in Indonesia.</i></p>	<p>Received 23/7/2024</p> <p>Revised 24/10/2024</p> <p>Accepted 29/12/2024</p>
<p>Keywords: Islamic Education, History Of Education, Pesantren, Madrasah, Education Policy</p>	
<p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dalam perspektif historis serta dinamika kebijakan yang memengaruhi transformasinya dari masa pra-kolonial hingga awal kemerdekaan. Fokus utama kajian ini adalah pada peran institusi pendidikan Islam seperti surau, pesantren, dan madrasah dalam membentuk identitas keagamaan, sosial, dan intelektual masyarakat Muslim Indonesia di tengah perubahan sosial dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui penelusuran dan seleksi literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal bereputasi, dokumen sejarah, serta publikasi akademik yang relevan dengan tema pendidikan Islam dan kebijakan pendidikan. Sumber-sumber tersebut dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan perspektif historis untuk memahami pola perkembangan, kontinuitas, dan perubahan pendidikan Islam dari masa ke masa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia berkembang secara adaptif melalui interaksi antara tradisi lokal, otoritas keagamaan, dan kebijakan negara. Pada masa kolonial, pendidikan Islam berperan sebagai sarana resistensi kultural terhadap sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif. Sementara itu, pasca-kemerdekaan ditandai dengan meningkatnya pengakuan negara terhadap madrasah melalui pembinaan, integrasi kurikulum, dan standarisasi nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan Islam merupakan sistem dinamis yang mampu bertransformasi tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan pendidikan yang berkeadilan dan kontekstual untuk memperkuat kualitas dan keberlanjutan pendidikan Islam di Indonesia.</p>	
<p>Kata Kunci: Pendidikan Islam, Sejarah Pendidikan, Pesantren, Madrasah, Kebijakan Pendidikan</p>	
<p>How to Cite: Romzi , M., Noviyanti, S. F., Wahananto , J., & Fitriani. (2024). The Transformation of Islamic Education in Indonesia: A Historical Review and Educational Policy: Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia: Tinjauan Historis Dan Kebijakan</p>	

INTRODUCTION

Masuknya Islam ke Indonesia masih menjadi diskursus akademik yang terbuka karena keterbatasan bukti empiris yang secara pasti menjelaskan waktu, jalur, dan pola awal penyebarannya. Sejumlah kajian menyebutkan bahwa Islam telah dikenal di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi melalui jaringan perdagangan internasional yang melibatkan pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India yang berinteraksi dengan masyarakat lokal di wilayah pesisir (Yudha, et al., 2024). Catatan Marco Polo pada akhir abad ke-13 juga sering dirujuk sebagai salah satu bukti awal keberadaan komunitas Muslim di Perlak, Aceh, yang menunjukkan bahwa Islam telah berakar sebelum periode kolonial. Meski demikian, perdebatan mengenai jalur masuk Islam apakah melalui pantai Sumatra, Barus, atau Jawa masih terus berkembang dan memperkaya khazanah historiografi Islam di Indonesia (Sebastian, & Alkaff, 2024; Sugiri, 2021).

Sejak fase awal penyebarannya, Islam di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan, tetapi juga menjadi kekuatan transformasi sosial yang signifikan, terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan Islam muncul sebagai kebutuhan fundamental umat Muslim, baik sebagai sarana transmisi nilai keagamaan maupun sebagai instrumen Islamisasi yang berkelanjutan (Saada, & Magadlah, 2021). Pada tahap awal, praktik pendidikan Islam berlangsung secara sederhana melalui halaqah-halaqah di masjid, mushola, dan ruang sosial lainnya, dengan metode pengajaran yang berorientasi pada hafalan dan transmisi lisan. Pola ini menunjukkan kemiripan dengan praktik pendidikan Islam klasik di Timur Tengah, namun berkembang secara khas sesuai konteks lokal Nusantara.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan adaptasinya terhadap struktur sosial dan budaya setempat (Rahman, 2022). Di Jawa, pesantren tumbuh dengan mengadopsi pola relasi guru-murid dan sistem asrama yang memiliki kemiripan dengan tradisi pendidikan Hindu-Buddha sebelumnya. Di Minangkabau, surau yang awalnya berfungsi sebagai institusi sosial dan adat bertransformasi menjadi pusat pendidikan Islam. Sementara itu, di Aceh, meunasah berkembang sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis komunitas yang terintegrasi dengan kehidupan sosial masyarakat. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa pendidikan Islam di Indonesia tidak berkembang secara homogen, melainkan plural dan kontekstual.

Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat deskriptif dan terbatas pada konteks lokal atau regional, tanpa memberikan pembacaan komparatif yang memadai dengan praktik pendidikan Islam di kawasan Asia Tenggara maupun dalam lanskap global. Padahal, secara regional, model pendidikan Islam di Indonesia memiliki perbedaan mendasar dengan sistem pendidikan di Malaysia dan Thailand Selatan yang lebih terintegrasi dengan kebijakan negara, maupun dengan madrasah modern di negara-negara mayoritas Muslim seperti Mesir, Pakistan, atau Turki yang cenderung mengadopsi sistem kurikulum nasional berbasis sekolah formal (Aslami, 2021). Dalam konteks global, pesantren Indonesia menampilkan keunikan karena mampu mempertahankan tradisi keilmuan klasik (kitab kuning) sekaligus beradaptasi dengan tuntutan modernitas, sebuah karakter yang tidak selalu ditemukan dalam model pendidikan Islam di negara Muslim lainnya (Hak, et al., 2023;).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana perkembangan pendidikan Islam di Indonesia berlangsung dalam lintasan sejarah serta bagaimana proses transformasi dan adaptasi sistem pendidikan Islam terhadap perubahan sosial, budaya, dan kebijakan negara. Penelitian ini juga berupaya menjawab pertanyaan mengenai posisi dan karakteristik pendidikan Islam Indonesia dalam konteks regional Asia Tenggara dan dinamika pendidikan Islam global. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dari masa awal Islamisasi hingga periode modern, sekaligus memetakan kekhasan model pendidikan Islam Indonesia dibandingkan dengan model pendidikan Islam di kawasan lain.

Kebutuhan untuk memperkuat kajian pendidikan Islam Indonesia melalui perspektif komparatif dan historis yang lebih luas menjadi kesenjangan dari beberapa penelitian sebelumnya. Sehingga pemaparan kronologis perkembangan pendidikan Islam, juga menjadi upaya menempatkan pesantren, surau, dan meunasah sebagai model

pendidikan Islam yang memiliki relevansi global. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi celah kajian yang selama ini kurang menyoroti posisi strategis pendidikan Islam Indonesia dalam peta pendidikan Islam dunia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi sejarah dan manajemen pendidikan Islam, khususnya dalam memahami dinamika adaptasi lembaga pendidikan Islam terhadap perubahan zaman. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan, pengelola lembaga pendidikan Islam, serta akademisi dalam merumuskan pengembangan pendidikan Islam yang berakar pada tradisi lokal namun tetap responsif terhadap tantangan global.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menelaah, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia (Arar, et al., 2022; Padil, et al., 2025; Arif, et al., 2024). Pendekatan ini dipilih karena karakter penelitian yang berorientasi pada penelusuran gagasan, konsep, dan dinamika historis pendidikan Islam, sehingga memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap perubahan dan transformasi sistem pendidikan Islam dalam lintasan waktu yang panjang.

Jenis penelitian ini bersifat historis-analitis dengan kecenderungan semi-sistematis, karena selain menelusuri perkembangan pendidikan Islam secara kronologis, penelitian ini juga menerapkan protokol literatur yang terstruktur untuk menjaga ketelusuran dan validitas sumber (Awaludin, 2024; Bachtiar, et al., 2024). Penelitian ini tidak sepenuhnya mengikuti *systematic literature review* berbasis statistik, namun mendekati kerangka PRISMA dalam proses identifikasi, penyaringan, dan seleksi literatur yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelusuri sumber-sumber akademik yang diperoleh dari berbagai basis data ilmiah bereputasi, seperti Google Scholar, Scopus, DOAJ, Garuda, dan portal jurnal nasional terakreditasi (Fitria, 2023). Selain itu, penelusuran juga dilakukan terhadap buku akademik, dokumen sejarah, serta publikasi institusional yang memiliki relevansi langsung dengan topik pendidikan Islam di Indonesia. Kriteria inklusi dalam penelitian ini mencakup sumber yang membahas sejarah masuknya Islam ke Indonesia, perkembangan lembaga pendidikan Islam (*pesantren*, *surau*, *meunasah*, dan *madrasah*), serta kajian tentang pengaruh sosial, budaya, dan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam. Sumber yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi sepuluh hingga lima belas tahun terakhir untuk menjamin kemutakhiran analisis, namun karya klasik dan dokumen historis tetap disertakan sepanjang memiliki relevansi konseptual dan historis yang kuat. Adapun kriteria eksklusi meliputi sumber non-akademik, artikel populer tanpa rujukan ilmiah yang memadai, serta literatur yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian pendidikan Islam (Fauzi, 2023; Fathani, et al., 2022).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan historis. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama, seperti fase perkembangan pendidikan Islam, bentuk kelembagaan, pola adaptasi sosial-budaya, dan intervensi kebijakan negara (Suroso, et al., 2021). Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis dan kronologis untuk menggambarkan dinamika pendidikan Islam dari masa awal Islamisasi hingga periode modern. Penarikan kesimpulan dilakukan secara interpretatif dengan mengaitkan temuan-temuan literatur untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai transformasi pendidikan Islam dalam konteks sejarah dan kebijakan pendidikan nasional.

Dalam aspek etika pengumpulan data, penelitian ini menjunjung tinggi prinsip integritas akademik dengan memastikan seluruh sumber yang digunakan dikutip secara akurat dan proporsional sesuai kaidah ilmiah. Tidak ada manipulasi data atau distorsi terhadap pandangan penulis asli dalam proses interpretasi literatur. Selain itu, penelitian ini menghindari plagiarisme dengan melakukan parafrase akademik yang bertanggung jawab serta mencantumkan rujukan secara transparan. Dengan penerapan etika penelitian kepustakaan tersebut, hasil kajian diharapkan memiliki kredibilitas ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Melalui metode dan protokol penelitian kepustakaan yang terstruktur ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual yang kuat dalam memperkaya kajian pendidikan Islam di Indonesia, sekaligus menawarkan perspektif historis yang lebih sistematis dan relevan dengan perkembangan studi pendidikan Islam kontemporer.

FINDINGS AND DISCUSSION

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dalam berbagai fase sejarah. Melalui pendekatan penelitian kepustakaan, berbagai sumber literatur telah dikaji secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi eksistensi dan transformasi pendidikan Islam di Nusantara (Arar, et al., 2022; Monady, et al., 2025). Dalam proses penelitian, berbagai data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola historis serta dinamika kebijakan yang berperan dalam membentuk sistem pendidikan Islam saat ini. Sebagai hasil dari kajian dan diskusi yang telah dilakukan, penelitian ini akan memaparkan temuan utama yang dirangkum dalam beberapa poin utama. Poin-poin tersebut akan menguraikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia, perkembangan lembaga pendidikan Islam, adaptasi pendidikan Islam terhadap perubahan sosial dan politik, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam konteks pendidikan Islam di era modern. Pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi akademisi, praktisi pendidikan, serta pemangku kebijakan dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam yang lebih maju dan relevan dengan perkembangan zaman.

Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kolonialisme

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada fase awal tidak dapat dilepaskan dari peran kerajaan-kerajaan Islam yang menjadi pusat kekuasaan politik, dakwah, dan transmisi keilmuan. Salah satu kerajaan Islam paling awal dan berpengaruh adalah Samudera Pasai di Aceh, yang berkembang sejak sekitar abad ke-10 Masehi. Kerajaan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Al-Malik Ibrahim bin Mahdun, Al-Malik al-Saleh, hingga Al-Malik Sabar Syah pada abad ke-15 M (Nasution, 2025). Catatan Ibnu Batutah menunjukkan bahwa Samudera Pasai telah memiliki sistem pendidikan Islam yang relatif mapan, dengan fokus pengajaran pada fikih mazhab Syafi'i, pelaksanaan pendidikan dalam bentuk majelis taklim dan halaqah, keterlibatan langsung penguasa sebagai figur religius dan politik, serta dukungan pendanaan pendidikan yang bersumber dari negara (Shidiq, 2021). Pola ini menandai keterpaduan antara kekuasaan politik dan institusi pendidikan Islam.

Di Jawa, perkembangan Islam dan pendidikan Islam mengalami akselerasi seiring berdirinya Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di wilayah tersebut. Demak memiliki keterkaitan genealogis dengan Majapahit melalui Raden Fatah, putra dari Sri Kertabumi dan Putri Cempa yang beragama Islam (Romdhoni, et al., 2024). Terdapat perbedaan pandangan di kalangan sejarawan mengenai tahun berdirinya Demak, antara 1478 M yang dikaitkan dengan runtuhnya Majapahit, atau 1518 M yang dikaitkan dengan berakhirnya kekuasaan Prabu Brawijaya VII (Rukayah, et al., 2023; Romdhoni, et al., 2024). Terlepas dari perdebatan tersebut, Demak berperan signifikan dalam penyebaran Islam dan pengembangan pendidikan Islam di Jawa. Sistem pendidikan yang berkembang memiliki kemiripan dengan Aceh, yaitu dengan menjadikan masjid sebagai pusat pembelajaran, di bawah bimbingan ulama yang sekaligus memiliki otoritas sosial dan keagamaan, yang dikenal dengan gelar Sunan, seperti Sunan Gunung Jati (Hajam, 2021).

Di kawasan timur Nusantara, Islam masuk ke Maluku melalui jalur dakwah dan perdagangan yang melibatkan mubaligh dari Jawa dan Malaka. Salah satu penguasa awal yang memeluk Islam adalah Sultan Marhum dari Ternate pada paruh kedua abad ke-15 M, yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Zainul Abidin (1465-1500 M) (Sulistiono, 2021). Proses Islamisasi ini turut membawa praktik pendidikan Islam yang berorientasi pada pembinaan keagamaan masyarakat dan penguatan legitimasi kekuasaan Islam di wilayah kepulauan rempah-rempah tersebut (Cui, & Li, 2025).

Di Kalimantan, Islam mulai berkembang pada abad ke-15 M melalui peran para mubaligh dari Jawa, terutama yang memiliki jaringan keilmuan dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri. Beberapa dai seperti Khatib Dayyan dari Kediri dan Sayid Abdul Rahman turut berperan dalam menyebarkan Islam dan membentuk basis pendidikan keagamaan di

wilayah pesisir Kalimantan (Al Qurtuby, 2021). Proses ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam berkembang secara gradual melalui relasi dakwah, perdagangan, dan jaringan santri lintas wilayah (Kedidir, et al., 2021).

Sementara itu, di Sulawesi, kerajaan kembar Gowa-Tallo menjadi pusat awal Islamisasi. Penguasanya, I. Mallingkaang Daeng Manyonri, memeluk Islam dan bergelar Sultan Abdullah Awwalul Islam, yang kemudian diikuti oleh Sultan Alauddin (Ali, 2024). Dalam waktu relatif singkat, Islam diterima secara luas oleh elite dan masyarakat (Barton, et al., 2021). Peran ulama seperti Dato Ri Bandang dari Minangkabau menegaskan kuatnya jaringan intelektual Islam antardaerah. Catatan penjelajah Portugis, Pinto, pada tahun 1544 M juga mengonfirmasi keberadaan mubaligh Islam dari Malaka dan Patani di Sulawesi, yang menunjukkan dimensi internasional dalam proses Islamisasi dan pendidikan Islam di wilayah ini.

Untuk memperjelas pola sebaran historis tersebut, berikut disajikan tabel ringkas kronologi penyebaran Islam dan pusat awal pendidikan Islam di Indonesia.

Wilayah	Kerajaan Islam Awal	Perkiraan Waktu	Ciri Utama Pendidikan Islam
Aceh	Samudera Pasai	Abad 10-15 M	Fikih Syafi'i, halaqah, dukungan negara
Jawa	Demak	Akhir abad 15-awal 16 M	Masjid sebagai pusat belajar, peran Walisongo
Maluku	Ternate	Abad 15 M	Pendidikan berbasis dakwah dan istana
Kalimantan	Kesultanan awal pesisir	Abad 15 M	Dakwah ulama Jawa, jaringan santri
Sulawesi	Gowa-Tallo	Akhir abad 16 M	Islamisasi elite, ulama lintas wilayah

Penyajian kronologis dan spasial ini menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam di Indonesia berlangsung secara bertahap, tidak seragam, dan sangat dipengaruhi oleh konteks politik, budaya, serta jaringan dakwah antardaerah (Frankema, & van Waijenburg, 2023). Dengan demikian, pendidikan Islam sejak awal telah menjadi bagian integral dari proses Islamisasi Nusantara dan membentuk fondasi bagi berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam pada periode-periode selanjutnya.

Sistem Pendidikan Islam Pada Masa Kolonialisme Belanda

Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam di Indonesia sering dikategorikan sebagai pendidikan Bumiputera karena peserta didiknya didominasi oleh penduduk pribumi dan berada di luar sistem pendidikan formal kolonial yang diperuntukkan bagi Eropa dan elite tertentu (Fischer, & Nisa, 2025; Chande, 2023; Gibson, & Bailey, 2023). Kebijakan pendidikan kolonial Belanda secara umum bersifat diskriminatif dan dualistik, dengan membedakan secara tegas antara pendidikan Barat dan pendidikan keagamaan lokal. Dalam konteks ini, pendidikan Islam berkembang secara mandiri sebagai bentuk resistensi kultural dan religius terhadap dominasi kolonial, sekaligus sebagai sarana pelestarian identitas keislaman masyarakat.

Pada fase awal, praktik pendidikan Islam di bawah kolonialisme Belanda menunjukkan kesinambungan dengan tradisi pra-kolonial, salah satunya melalui kerangka pendidikan yang menggabungkan unsur Hindu-Buddha dan Islam. Sistem ini memadukan pola pendidikan keraton dan pertapaan, di mana pada satu sisi pendidikan dilakukan secara elitis bagi kalangan bangsawan dan istana melalui guru yang datang langsung kepada murid, sementara di sisi lain berkembang pola asketis yang membuka akses pendidikan bagi masyarakat luas dengan murid mendatangi guru di tempat pengasingan atau padepokan (Dryden-Peterson, 2022; Iori, 2023). Model ini menunjukkan adanya transformasi dari sistem pendidikan berbasis kelas sosial menuju sistem yang lebih inklusif, seiring dengan menguatnya nilai-nilai egalitarian dalam Islam.

Pola pendidikan serupa juga dapat ditemukan dalam konteks kolonial India di bawah Inggris, di mana lembaga pendidikan Islam tradisional seperti madrasah dan khanqah tetap bertahan meskipun ditekan oleh kebijakan pendidikan Barat ala Macaulay. Di India, pendidikan Islam berfungsi sebagai benteng identitas keagamaan dan intelektual umat Muslim dalam menghadapi hegemoni kolonial Inggris. Kesamaan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di wilayah kolonial umumnya berkembang sebagai ruang alternatif yang tidak sepenuhnya berada dalam kontrol negara colonial (Momen, et al., 2024).

Selain itu, kerangka pendidikan Islam berbasis surau atau langgar berkembang pesat, terutama di wilayah Minangkabau. Surau merupakan institusi pendidikan dan sosial yang berakar kuat dalam tradisi masyarakat Asia Tenggara, termasuk di Sumatera Selatan, Semenanjung Malaya, dan Patani (Thailand). Secara historis, surau diduga memiliki keterkaitan dengan institusi pendidikan Hindu-Buddha di India yang kemudian mengalami proses Islamisasi (Manan, et al., 2022). Dalam konteks kolonial, surau di Minangkabau memainkan peran strategis sebagai pusat transmisi ilmu agama, pembinaan moral, dan penguatan solidaritas sosial, serupa dengan peran pondok di Malaya yang berkembang di luar sistem pendidikan kolonial Inggris. Di Malaya, pondok menjadi lembaga pendidikan Islam tradisional yang relatif otonom dan berfungsi sebagai pusat perlawanan kultural terhadap penetrasi pendidikan kolonial.

Bentuk pendidikan Islam yang paling mapan dan berkelanjutan pada masa kolonial adalah pesantren. Dalam literatur akademik, terdapat dua pandangan utama mengenai asal-usul pesantren. Pandangan pertama menyatakan bahwa pesantren merupakan institusi pendidikan Islam yang bersumber dari tradisi Islam global, khususnya praktik tasawuf yang berkembang di Timur Tengah dan Afrika Utara melalui lembaga zawiyah (Ahmed, & Sukdaven, 2021; Abdur-Rashid, 2021). Pandangan kedua menyebutkan bahwa pesantren merupakan hasil Islamisasi lembaga pendidikan Hindu-Buddha yang telah ada sebelumnya, sebagaimana ditunjukkan oleh kemungkinan etimologis kata pesantren yang dikaitkan dengan istilah shastri dalam bahasa Sanskerta (Maimunah, et al., 2021). Terlepas dari perdebatan tersebut, pesantren terbukti mampu beradaptasi dengan situasi kolonial dan menjadi institusi pendidikan Islam yang paling tahan terhadap intervensi kolonial.

Dalam konteks kolonialisme pendidikan, pesantren di Indonesia memiliki kemiripan dengan madrasah tradisional di India dan pondok di Malaya, yang sama-sama menolak integrasi penuh ke dalam sistem pendidikan kolonial. Namun, pesantren menunjukkan keunikan tersendiri karena mempertahankan kurikulum berbasis kitab kuning sekaligus membangun sistem pendidikan berasrama yang kuat. Karel A. Steenbrink mencatat bahwa sejak akhir abad ke-19, kurikulum pesantren telah mendapat perhatian sarjana kolonial Belanda seperti L.W.C. van den Berg, yang mendokumentasikan penggunaan kitab-kitab fikih, ushuluddin, tasawuf, dan ilmu bahasa Arab sebagai inti pendidikan pesantren di Jawa dan Madura.

Secara umum, pengajaran di pesantren berfokus pada ilmu fikih sebagai landasan utama pembentukan kesadaran hukum dan etika keislaman. Namun demikian, mata pelajaran lain seperti tasawuf, akhlak, dan ilmu alat tidak diabaikan. Penguasaan bahasa Arab dipandang sebagai prasyarat penting untuk memahami teks-teks keagamaan klasik yang menjadi rujukan utama pembelajaran (Abdalla, 2025; Howell, et al., 2025). Pola ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transmisi ilmu agama, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter dan etos keilmuan santri.

Dengan membandingkan pendidikan Islam di Indonesia dengan praktik pendidikan Islam di koloni India dan Malaya, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam di wilayah-wilayah kolonial berkembang sebagai sistem alternatif yang relatif otonom, berakar pada tradisi lokal, dan berfungsi sebagai sarana resistensi kultural terhadap dominasi kolonial. Dalam konteks Indonesia, pesantren, surau, dan lembaga pendidikan Islam lainnya tidak hanya bertahan, tetapi juga membentuk fondasi penting bagi perkembangan pendidikan Islam nasional pada masa pascakolonial.

Kondisi Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Jepang

Meskipun keadaan pengajaran Jepang begitu mengerikan, bagi Islam ada nilai positif minimal di awal masuknya Jepang ke Indonesia, umat Islam yakin bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia dapat diakui, dengan masuknya Jepang ke Indonesia dan pengusiran Belanda. Sebagai umat Islam, individu Indonesia yang telah mengalami pemisahan dalam masalah kehidupan yang ketat, dengan masuknya Jepang ke Indonesia akan berakhir (Budianto, 2024; Laffan, 2021). Oleh karena itu, Jepang secara konsisten menekankan pentingnya menghormati dan menyukai Islam. Di hadapan para ulama, Letnan Jenderal Imamura, penguasa militer Jepang yang paling terkemuka di Jawa, menyampaikan wacana yang menyatakan bahwa pihak Jepang bermaksud untuk mengamankan dan menghormati Islam.

Pemerintah Jepang memiliki segala ciri untuk menjaga kepentingan Islam, yang merupakan tata cara untuk kepentingan dunia akhirat. Untuk bergerak ke arah umat Islam, mereka melakukan beberapa pendekatan, antara lain, Kantor ketatausahaan yang

ada pada zaman Belanda dikenal dengan kantor voor islamistische zasaki yang dimotori orientalis Belanda, diubah oleh Jepang menjadi kantor sumubi yang dimotori KH. Hasyim Asy'ari. Peneliti Islam dalam upaya bersama dengan pelopor orientalis diizinkan untuk membentuk garis penjagaan negara (PETA). Umat Islam diperbolehkan untuk berproses dalam suatu perkumpulan yang disebut Majelis Islam Indonesia (MIAI) yang bersifat sosial. Meskipun demikian, pada bulan Oktober 1943 MIAI dibubarkan dan diganti dengan Majelis Sura Muslim Indonesia (MASYUMI). Sekolah-sekolah Islam yang sangat besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pemerintah Jepang. Sekolah negeri diberikan contoh orang yang substansinya tidak dapat dibedakan dengan pelajaran ketat. Pemerintah Jepang mengizinkan pengembangan jalur Hizbullah untuk memberikan premis taktis kepada pemuda Muslim, jalur ini dimotori oleh K.H. Zainal Arifin. Pemerintah Jepang mengizinkan pendirian sekolah menengah Islam di Jakarta yang dipimpin oleh K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Bung Hatta (Badawi, 2023; Alam, & Miah, 2024; Bhargav, 2022).

Mentalitas penjajah Jepang terhadap persekolahan Islam akhirnya menjadi lebih penyayang, sehingga ruang pengajaran lebih terbebaskan dibandingkan pada masa provinsi Belanda. Hal ini memberikan peluang bagi madrasah untuk berkembang, lebih tepatnya Pertama Madrasah (Machmudi, 2023; Hefner, 2025). Menjelang awal pendudukan Jepang, madrasah berkembang pesat, terutama dalam hal jumlah. Hal ini dapat dilihat khususnya di wilayah Sumatera yang populer dengan madrasah awalnya yang dilatarbelakangi oleh majelis ulama yang tinggi. Kedua, Pendidikan Agama di Sekolah. Sekolah yang didanai pemerintah dipenuhi dengan ilustrasi karakter. Hal ini memberikan kesempatan kepada pendidik agama Islam untuk mengisinya dengan pelajaran yang ketat, dan dalam pelatihan yang ketat juga disertakan pelajaran jihad melawan para penyusup. Ketiga, Universitas Islam. Pemerintah Jepang mengizinkan pendirian sekolah menengah Islam di Jakarta yang dimotori oleh KH. Wahid Hasyim, KH. Muzakkar dan Bung Hatta (Latief, 2022).

Meskipun Jepang berusaha untuk mendekati umat Islam dengan memberikan kesempatan dalam agama dan dalam menciptakan sekolah, para ulama tidak akan tunduk kepada pemerintah Jepang, jika mereka mencampuri kepercayaan individu (Erashah, & Pratama, 2024). Masa Jepang pertempuran KH. Hasyim Asy'ari dan rekan-rekannya menentang aturan tersebut. Kufr Jepang yang meminta untuk melakukan seikere (tentang penguasa Jepang yang dianggap sebagai kerabat dewa matahari). Karena sikap ini dia ditangkap dan ditahan oleh Jepang untuk waktu yang sangat lama. Meskipun alam semesta pengajaran sebagian besar dibubarkan, karena siswa pergi ke kelas setiap hari mereka hanya disarankan untuk berolahraga, berjalan, bekerja (romusha), bernyanyi, dll. Yang cukup beruntung adalah madrasah-madrasah yang berada dalam iklim sekolah live-in Islam yang dibebaskan dari pengawasan langsung pemerintah pendudukan Jepang. Pembelajaran di sekolah Islam semua inklusi tetap dapat berjalan dengan normal.

Pendidikan Pada Masa Kemerdekaan (Orde Lama)

Pasca kemerdekaan Indonesia, pendidikan Islam mulai memperoleh perhatian yang lebih serius dan terstruktur dari negara, baik dalam sistem pendidikan formal negeri maupun lembaga pendidikan keagamaan non-negeri. Perhatian tersebut secara eksplisit tercermin dalam pernyataan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) pada 27 Desember 1945 yang menegaskan bahwa madrasah dan sekolah agama Islam merupakan alat serta sumber penting pendidikan dan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia (Saefudin, 2021). Pernyataan ini memiliki makna strategis karena menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian integral dari pembangunan pendidikan nasional, bukan sekadar aktivitas keagamaan komunitas.

Dalam konteks awal negara-bangsa yang masih membangun fondasi sistem pendidikannya, pengakuan tersebut menjadi dasar legitimasi bagi keterlibatan negara dalam pengembangan pendidikan Islam. Di Sumatera, Mahmud Yunus, yang menjabat sebagai inspektur pendidikan agama, mengajukan rekomendasi agar pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri diselenggarakan secara resmi, dengan guru agama memperoleh status dan penghasilan yang setara dengan guru mata pelajaran umum. Rekomendasi ini diterima oleh pemerintah dan menjadi salah satu tonggak penting dalam institusionalisasi pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah negeri (Mahmud, et al., 2024). Sejak saat itu, pendidikan agama Islam mulai memperoleh posisi yang lebih sistematis dan terjamin dalam kerangka pendidikan nasional.

Langkah strategis berikutnya adalah pembentukan Departemen Agama pada 13

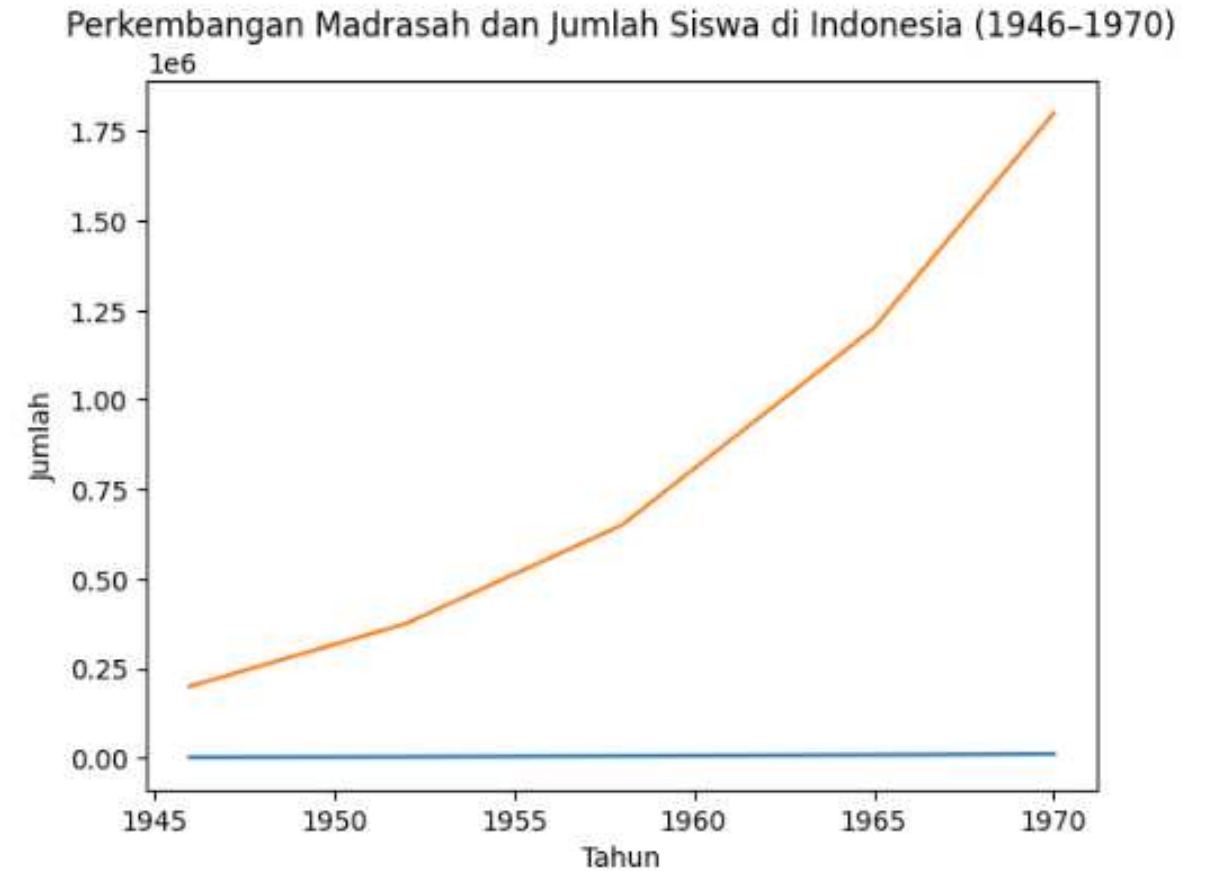
Desember 1946, yang secara khusus diberi mandat untuk mengelola, membina, dan mengembangkan pendidikan agama, termasuk madrasah dan sekolah Islam yang didanai oleh pemerintah. Keberadaan Departemen Agama memperkuat posisi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang diakui negara, sekaligus menjadi jembatan antara pendidikan keagamaan dan sistem pendidikan nasional. Dampaknya terlihat dari meningkatnya jumlah madrasah yang memperoleh pembinaan dan pengakuan administratif dari pemerintah.

Secara statistik, perkembangan madrasah pada dekade awal kemerdekaan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Data Departemen Agama pada pertengahan 1950-an mencatat ribuan madrasah telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia, dengan konsentrasi terbesar berada di Jawa dan Sumatera. Pada akhir dekade 1950-an, jumlah madrasah tercatat mencapai lebih dari 10.000 unit, meskipun sebagian besar masih berstatus swasta dan berbasis komunitas. Peningkatan kuantitas ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan Islam yang terorganisasi, sekaligus respons positif terhadap kebijakan negara yang mulai memberikan dukungan struktural.

Pada tahun 1958, pemerintah secara resmi membatasi sekaligus menata pengembangan Madrasah Negeri dengan menetapkan komposisi kurikulum sebesar 30 persen mata pelajaran agama dan 70 persen mata pelajaran umum (Öztürk, 2025). Kebijakan ini menandai upaya integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional tanpa menghilangkan karakter keislamannya. Secara kelembagaan, struktur madrasah disetarakan dengan sekolah umum negeri, baik dari segi jenjang pendidikan maupun administrasi. Sistem jenjang madrasah dibagi menjadi Madrasah Ibtidaiyah dengan masa studi enam tahun, Madrasah Tsanawiyah dengan masa studi tiga tahun, dan Madrasah Aliyah dengan masa studi tiga tahun.

Kebijakan tersebut berdampak langsung pada peningkatan status sosial madrasah dan perluasan akses pendidikan Islam yang lebih berkualitas. Data pada awal 1960-an menunjukkan bahwa madrasah negeri mulai tumbuh di berbagai provinsi, meskipun jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan madrasah swasta. Namun demikian, keberadaan madrasah negeri berfungsi sebagai model standar bagi pengelolaan madrasah swasta, khususnya dalam hal kurikulum, kualifikasi guru, dan tata kelola kelembagaan. Peran Mahmud Yunus sebagai Kepala Seksi Agama di tingkat provinsi menjadi krusial dalam mengawal kebijakan ini agar selaras dengan visi integrasi pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan demikian, periode pascakemerdekaan merupakan fase penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, ditandai oleh pengakuan negara, pembentukan kelembagaan formal, serta pertumbuhan kuantitatif madrasah yang signifikan. Data



statistik perkembangan madrasah pada masa ini memperlihatkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya bertahan setelah kemerdekaan, tetapi justru mengalami ekspansi dan transformasi yang menjadi fondasi bagi sistem pendidikan Islam Indonesia hingga saat ini.

Secara interpretatif, grafik menunjukkan bahwa jumlah madrasah mengalami peningkatan yang konsisten dan relatif stabil dari masa awal kemerdekaan hingga awal Orde Baru. Peningkatan ini mencerminkan semakin kuatnya pengakuan negara terhadap madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional (Findikli, 2022; Ihsan, et al., 2024). Sementara itu, jumlah siswa menunjukkan kurva kenaikan yang lebih tajam, terutama setelah tahun 1958 hingga 1970, yang mengindikasikan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan madrasah serta dampak dari integrasi kurikulum agama dan umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam di Indonesia berlangsung melalui proses historis yang panjang, dinamis, dan kontekstual, sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan politik, struktur sosial-budaya, serta kebijakan negara pada setiap fase sejarah. Temuan utama penelitian menegaskan bahwa pendidikan Islam sejak masa pra-kolonial telah berfungsi sebagai instrumen dakwah, transmisi keilmuan, dan pembentukan identitas sosial umat Islam, yang kemudian mengalami transformasi seiring dengan perubahan rezim kekuasaan dari kerajaan Islam, kolonialisme Barat, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan.

Pada fase pra-kolonial, pendidikan Islam berkembang secara organik melalui institusi-institusi yang berakar kuat pada struktur lokal seperti masjid, surau, meunasah, dan pesantren. Keterpaduan antara kekuasaan politik dan otoritas keagamaan, sebagaimana terlihat pada kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, Ternate, dan Gowa-Tallo, menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran agama, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi kekuasaan dan integrasi sosial (Saada, & Magadlah, 2021). Pola ini memperlihatkan bahwa pendidikan Islam sejak awal bersifat adaptif, mampu mengakomodasi tradisi lokal tanpa kehilangan substansi ajaran Islam. Temuan ini memperkuat argumen bahwa fleksibilitas kultural merupakan salah satu faktor kunci keberlanjutan pendidikan Islam di Indonesia.

Memasuki masa kolonial Belanda, pendidikan Islam mengalami marginalisasi struktural melalui kebijakan pendidikan dualistik yang memisahkan pendidikan Barat dan pendidikan keagamaan pribumi (Davids, & Waghid, 2021; Sumanti, et al., 2024). Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam justru mengalami konsolidasi internal melalui penguatan pesantren dan surau sebagai ruang pendidikan alternatif yang relatif otonom. Dalam konteks ini, pesantren tidak hanya bertahan sebagai lembaga pendidikan tradisional, tetapi juga bertransformasi menjadi pusat resistensi kultural dan intelektual terhadap kolonialisme. Perbandingan dengan pendidikan Islam di India dan Malaya memperlihatkan pola yang serupa, di mana lembaga pendidikan Islam tradisional berkembang sebagai benteng identitas keagamaan di tengah hegemoni pendidikan kolonial. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan Islam di wilayah kolonial memiliki karakter transnasional dalam hal strategi adaptasi dan resistensi.

Pada masa pendudukan Jepang, hasil penelitian menunjukkan adanya ambivalensi kebijakan terhadap pendidikan Islam. Di satu sisi, Jepang memberikan ruang yang lebih longgar bagi aktivitas keagamaan dan pendidikan Islam sebagai strategi politik untuk memperoleh dukungan umat Islam. Di sisi lain, kebijakan tersebut bersifat instrumental dan tetap berada dalam kerangka kepentingan militer Jepang (Yamashita, 2022; Kotani, et al., 2022; Budianto, 2024). Meskipun demikian, periode ini memberikan momentum penting bagi ekspansi madrasah dan penguatan peran ulama dalam ranah sosial-politik. Temuan ini mengindikasikan bahwa bahkan dalam konteks penjajahan yang represif, pendidikan Islam mampu memanfaatkan celah politik untuk memperluas pengaruh dan institusionalisasinya.

Transformasi paling signifikan dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia terjadi pada masa awal kemerdekaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan formal negara terhadap madrasah dan pendidikan agama Islam menjadi titik balik penting dalam integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Pembentukan Departemen Agama, kebijakan pengangkatan guru agama di sekolah negeri, serta penetapan standar kurikulum madrasah mencerminkan perubahan paradigma negara dari sikap marginalisasi menjadi akomodasi institusional (Abdul et al., 2024). Data statistik yang menunjukkan peningkatan jumlah madrasah dan peserta didik secara

signifikan pada periode 1946-1970 mengonfirmasi bahwa kebijakan negara berpengaruh langsung terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan Islam (Jamilah, 2021; Kosim, et al., 2023). Integrasi kurikulum agama dan umum juga menandai pergeseran orientasi madrasah dari lembaga pendidikan keagamaan murni menjadi lembaga pendidikan yang berfungsi ganda, yakni religius dan akademik.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai sistem yang statis atau terisolasi, melainkan sebagai entitas historis yang terus bernegosiasi dengan kekuasaan, budaya, dan kebijakan negara. Temuan ini memberikan kontribusi pada kajian sejarah pendidikan Islam dengan menekankan pentingnya pendekatan historis-komparatif dalam memahami dinamika pendidikan Islam di negara mayoritas Muslim yang memiliki latar kolonial.

Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam kontemporer. Pengalaman historis menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan Islam sangat ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan identitas dasar. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan Islam di era modern perlu memperhatikan keseimbangan antara integrasi ke dalam sistem pendidikan nasional dan pelestarian karakter keislaman. Selain itu, peran negara seharusnya tidak hanya terbatas pada regulasi dan standarisasi, tetapi juga pada pemberdayaan kelembagaan madrasah dan pesantren agar mampu merespons tantangan globalisasi, digitalisasi, dan kebutuhan masyarakat modern.

Dengan demikian, diskusi hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan Islam di Indonesia merupakan produk sejarah yang kompleks dan berlapis, yang keberlanjutannya hingga saat ini merupakan hasil dari kemampuan adaptasi struktural, kultural, dan kebijakan. Pemahaman atas dinamika historis ini menjadi landasan penting bagi upaya merumuskan arah pengembangan pendidikan Islam yang inklusif, kontekstual, dan berdaya saing di masa depan.

CONCLUSION

pendidikan Islam di Indonesia berkembang melalui proses historis yang panjang dan adaptif, dipengaruhi oleh interaksi antara tradisi lokal, otoritas keagamaan, dan kebijakan politik pada setiap fase sejarah. Sejak masa pra-kolonial hingga kolonial, pendidikan Islam berfungsi tidak hanya sebagai sarana transmisi ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai medium pembentukan identitas sosial dan resistensi kultural terhadap dominasi kekuasaan asing. Institusi seperti surau, pesantren, dan madrasah menunjukkan daya lenting yang tinggi dalam mempertahankan eksistensinya, meskipun berada dalam tekanan sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan pendidikan Islam sangat ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi secara kontekstual tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental keislaman.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa periode awal kemerdekaan menjadi titik balik penting dalam transformasi pendidikan Islam menuju sistem yang lebih terinstitusionalisasi dan diakui negara. Peningkatan jumlah madrasah dan peserta didik, disertai integrasi kurikulum agama dan umum, mencerminkan perubahan paradigma kebijakan negara dari marginalisasi menuju akomodasi dan penguatan kelembagaan pendidikan Islam. Implikasi praktis dari temuan ini adalah pentingnya peran negara dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga pemberdayaan, agar madrasah dan pesantren mampu meningkatkan kualitas pendidikan serta relevan dengan tuntutan zaman. Secara teoretis, temuan ini memperkuat perspektif bahwa pendidikan Islam merupakan sistem dinamis yang berkembang melalui negosiasi antara tradisi, modernitas, dan kebijakan publik.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, kajian ini masih bersifat makro-historis dan belum menggali secara mendalam variasi perkembangan pendidikan Islam pada tingkat regional dan lokal, khususnya di luar Jawa dan Sumatera. Kedua, perbandingan dengan konteks kolonial lain seperti India dan Malaysia masih bersifat konseptual dan belum didukung oleh analisis data arsip kolonial yang komprehensif. Ketiga, penelitian ini belum secara eksplisit menelaah dampak kebijakan pendidikan Islam terhadap kualitas lulusan dalam perspektif jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengembangkan pendekatan komparatif lintas wilayah dan lintas negara berbasis arsip kolonial dan data empiris, serta mengombinasikan metode historis dengan studi lapangan dan analisis kebijakan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman

tentang dinamika pendidikan Islam sekaligus menyempurnakan kelemahan dan keterbatasan penelitian ini.

ACKNOWLEDGMENT

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia atas dukungan kebijakan dan ketersediaan data terkait pendidikan Islam, serta kepada para peneliti dan akademisi yang karya-karyanya menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada pengelola perpustakaan perguruan tinggi dan jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang menyediakan akses literatur. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan sejawat di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muntahy atas diskusi akademik dan masukan konstruktif yang turut menyempurnakan penelitian ini.

REFERENCES

- Abdalla, M. (2025). Exploring tarbiyah in Islamic education: A critical review of the English-and Arabic-language literature. *Education Sciences*, 15(5), 559.
<https://doi.org/10.3390/educsci15050559>
- Abdul Jaleel, K. A., Abdul Khader Aneesh, A., Shahid, M., Abdul Rasheed, K. M., Razeena, S., Mubeena, M., & Nubeera, M. (2024). Cultivating Knowledge: A Comprehensive Examination of Madrasa Education System in India. In *The AI Revolution: Driving Business Innovation and Research: Volume 2* (pp. 787-801). Cham: Springer Nature Switzerland.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-54383-8_60
- Abdur-Rashid, K. (2021). Financing kindness as a society: The rise and fall of the Waqf as a central Islamic philanthropic institution (Awqāf). *Journal of Muslim Philanthropy & Civil Society*, 5(1).
- Ahmed, S., & Sukdaven, M. (2021). Application of themes from Al-Mawwaq's work in reforming the Deoband curriculum in Islamic education in the South African Darul Ulooms. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 77(4).
<https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6673>
- Al Qurtuby, S. (2021). Saudi Arabia and Indonesian Networks: On Islamic and Muslim Scholars. *ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture*, 2(2), 17-44.
<https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v3i1.118>
- Alam, M. K., & Miah, M. S. (2024). Do Islamic banks use institutional theory in the light of Shariah governance? Empirical evidence from a Muslim dominant country. *Heliyon*, 10(2).
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24252>
- Ali, M. (2024). Integration of Islam into the Malay and Bugis-Makassar kingdoms. In *Southeast Asian Islam* (pp. 121-142). Routledge India.
<https://doi.org/10.4324/9781032702902-8>
- Arar, K., Sawalhi, R., & Yilmaz, M. (2022). The research on Islamic-based educational leadership since 1990: An international review of empirical evidence and a future research agenda. *Religions*, 13(1), 42.
<https://doi.org/10.3390/rel13010042>
- Arif, M., Chapakiya, S., & Dewi, A. Y. (2024). Character Education in Indonesia Islamic Elementary Schools: A Systematic Literature Review (2014-2024). *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(1).
<https://doi.org/10.18860/jpai.v11i1.29301>
- Aslami, H. (2021). Financing public higher education in Afghanistan: alternative sources and options. *Doctoral Dissertations*, 2265.
- Awaludin, A. (2024). Documenting the Half-Century Evolution of Islamic Education Research: A Probabilistic Topic Modeling Study of the Literature from 1970 to 2023. *Studia Islamika*, 31(3), 439-475.
<https://doi.org/10.36712/sdi.v31i3.41513>
- Bachtiar, W. F., Masruroh, N. A., Asih, A. M. S., & Sari, D. P. (2024). Halal food sustainable traceability framework for the meat processing industry. *Journal of Islamic Marketing*, 15(11), 2759-2784.
<https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2023-0412>
- Badawi, H. (2023). Learning from Japan: advancing education in the Arab and Islamic world through creative approaches. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 290-

- <https://doi.org/10.31538/nzh.v6i2.3516>
- Barton, G., Yilmaz, I., & Morieson, N. (2021). Authoritarianism, democracy, islamic movements and contestations of islamic religious ideas in Indonesia. *Religions*, 12(8), 641.
<https://doi.org/10.3390/rel12080641>
- Bhargav, V. V. (2022). A Hindu Champion of Pan-Islamism: Lajpat Rai and the Khilafat Movement. *The Journal of Asian Studies*, 81(4), 689-705.
<https://doi.org/10.1017/S0021911822000511>
- Budianto, F. (2024). Promoting Diversity, Introducing Islam: Muslim Indonesian Professionals in Contemporary Corporate Japan. *Asia-Pacific Journal*, 22(4), e3.
<https://doi.org/10.1017/S1557466024029103>
- Chande, A. (2023). Global politics of knowledge production: The challenges of Islamization of knowledge in the light of tradition vs secular modernity debate. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 271-289.
<https://doi.org/10.31538/nzh.v6i2.3502>
- Cui, J., & Li, T. (2025). Religion, Power, and National Identity: The Dual Role of Islam in the History and Modernization of the Maldives. *Religions*, 16(2), 201.
<https://doi.org/10.3390/rel16020201>
- Davids, N., & Waghid, Y. (2021). Muslim schooling in South Africa and the need for an educational crisis?. *Educational Philosophy and Theory*, 53(14), 1509-1519.
<https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1867109>
- Dryden-Peterson, S. (2022). *Right where we belong: How refugee teachers and students are changing the future of education*. Harvard University Press.
<https://doi.org/10.2307/j.ctv2bndf1r>
- Erasiah, E., & Pratama, F. S. (2024). Islam in Japan: from Confinement to Muslim-Friendly. *Journal of Al-Tamaddun*, 19(2), 89-100.
<https://doi.org/10.22452/JAT.vol19no2.6>
- Fathani, A. T., Azmi, N. A., Mughni, M., Islami, I. R., & Syukri, A. (2022). Towards Sustainable Development of Islamic Higher Education: A Meta-Analysis of Challenges and Opportunities. *Millah: Journal of Religious Studies*, 741-770.
<https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss3.art5>
- Fauzi, M. A. (2023). Knowledge hiding behavior in higher education institutions: a scientometric analysis and systematic literature review approach. *Journal of knowledge management*, 27(2), 302-327.
<https://doi.org/10.1108/JKM-07-2021-0527>
- Findikli, B. (2022). Rethinking ancient centers of higher learning: madrasa in a comparative-historical perspective. *British Journal of Educational Studies*, 70(2), 129-144.
<https://doi.org/10.1080/00071005.2021.1901853>
- Fischer, J., & Nisa, E. F. (2025). Emerging middles: Class, development and the halal economy in Indonesia and Malaysia. *Research in Globalization*, 10, 1-10.
<https://doi.org/10.1016/j.resglo.2025.100276>
- Fitria, T. N. (2023). Utilization of SINTA (Science and Technology Index) as Web-based Research Information Systems and Technology Performance Measurement. *International Journal of Computer and Information System (IJCIS)*, 4(02), 50-62.
<https://doi.org/10.29040/ijcis.v4i2.114>
- Frankema, E., & van Waijenburg, M. (2023). What about the race between education and technology in the Global South? Comparing skill premiums in colonial Africa and Asia. *The Economic History Review*, 76(3), 941-978.
<https://doi.org/10.1080/14767724.2022.2045909>
- Gibson, M. T., & Bailey, L. (2023). Constructing international schools as postcolonial sites. *Globalisation, Societies and Education*, 21(3), 405-416.
- Hajam, H. (2021). Sufferance within a Cultural Framework as the Preaching Strategy of Sunan Gunungjati in Forming a Civil Society. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(4), 257-285.
- Hak, N., Mustaqim, A., Baidhowi, A., & Zuhri, S. (2023). Genealogi dan jaringan keilmuan pesantren modern: di Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
- Hefner, R. W. (2025). The Social Scientific Study of Islam in Indonesia: A 75 Year Retrospective. *Studia Islamika*, 32(1), 9-42.

- <https://doi.org/10.36712/sdi.v32i1.45289>
- Howell, H. R., Salleh, M. N. M., Rosin, N., ZA, T., Maarif, M. A., & Adnan, M. A. M. (2025). Arabic language curriculum as a foundation for strengthening religious education in public higher education. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 22(1), 97-121.
<https://doi.org/10.14421/jpai.v22i1.11340>
- Ihsan, I., Pabbajah, M., Abdullah, I., & Hidayati, H. (2024). The contestation of national and religious curricula in indonesia's madrasas since the passage of the uusp. *Educational Studies*, 50(4), 434-447.
<https://doi.org/10.1080/03055698.2021.1958757>
- Iori, E. (2023). Releasing urban religion beyond the city wall: The spatial capital of early Buddhist monasticism in NW South Asia. *Numen*, 70(2-3), 184-219.
<https://doi.org/10.1163/15685276-20231691>
- Jamilah, S. (2021). Moderate islamic education to enhance nationalism among Indonesian Islamic student organizations in the era of society 5.0. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(3), 79-100.
- Kedidir, M. (2021). Connections of Maghrebin and Sub-Saharan Intellectuals: Trajectories and Representations. *Religions*, 12(4), 281.
<https://doi.org/10.3390/rel12040281>
- Kosim, M., Muqoddam, F., Mubarak, F., & Laila, N. Q. (2023). The dynamics of Islamic education policies in Indonesia. *Cogent Education*, 10(1), 2172930.
<https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2172930>
- Kotani, H., Tamura, M., & Nejima, S. (2022). Mosques in Japan responding to COVID-19 pandemic: Infection prevention and support provision. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 69, 102702.
<https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102702>
- Laffan, M. (2021). The forgotten Jihad under Japan: Muslim reformism and the promise of Indonesian independence. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 64(1-2), 125-161.
<https://doi.org/10.1163/15685209-12341532>
- Latief, H. (2022). The masyumi networks and the proliferation of Islamic higher education in Indonesia (1945–1965). *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 178(4), 477-502.
<https://doi.org/10.1163/22134379-bja10043>
- Machmudi, Y. (2023). Islam, Modern Turkey, and a Javanese Intellectual: The Sutomo's Visit to Turkey in 1937. *Studia Islamika*.
<https://doi.org/10.36712/sdi.v30i2.22386>
- Mahmud, H. H., Mashdurohatun, A., & Al-Amruzi, H. F. (2024). Reconstruction of regulations for the establishment and implementation of Islamic boarding schools based on justice values. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 31(1), 2289-1560.
- Maimunah, I., Huda, M., Haque, A., & Zubaidah, Z. (2021). Islamic boarding school at university: a strong pathway for integrating religion and science. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(1).
<https://doi.org/10.18860/jpai.v8i1.15361>
- Manan, A., Armi, F. R., & Amri, W. Y. (2022). The expansion of Islam in Pattani, South Thailand: a historical analysis. *Journal of Al-Tamaddun*, 17(1), 85-95.
<https://doi.org/10.22452/JAT.vol17no1.7>
- Momen, A., Ebrahimi, M., & Yusoff, K. (2024). British Colonial Education in the Indian Subcontinent (1757-1858): Attitude of Muslims. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(1), 17-39.
<https://doi.org/10.32350/jitc.141.02>
- Monady, H., Hasan, M., & Sagir, A. (2025). Building Hadith Authority: the Pioneering Role of Malay Archipelago Scholars. *Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 23(1), 73-100.
<https://doi.org/10.1163/22321969-20250167>
- Nasution, K. A. (2025). *Sejarah Ringkas Kerajaan Samudra Pasai: Sejarah Peradaban Luhur Nusantara*. DIVA PRESS.
- Öztürk, K. (2025). Civil society and education in Turkey: the relations between the Society for the Dissemination of Knowledge and Imam Hatip Schools (1951-1976). *Middle Eastern Studies*, 61(1), 18-36.
<https://doi.org/10.1080/00263206.2024.2371839>

- Padil, M., Asy'arie, B. F., Pranajaya, S. A., Alfiyanto, A., Wahyudi, D., Mahdi, M., ... & Tharaba, M. F. (2025). Political exploration and Islamic education methods in Indonesia: A systematic literature review in the perspective of Sustainable Development Goals (SDGs). *Journal of Posthumanism*, 5(3), 1014-1041.
<https://doi.org/10.63332/joph.v5i3.839>
- Rahman, B. A. (2022). Islamic revival and cultural diversity: Pesantren's configuration in contemporary Aceh, Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(1), 201-229.
<https://doi.org/10.18326/ijims.v12i1.201-229>
- Romdhoni, A., Noh, N. B. C., Cholid, N., Hartatik, E. S., & Wasino, W. (2024). Majapahit Heritage in the Cultural System of the Sultanate of Demak Bintara. *Paramita: Historical Studies Journal*, 34(2).
- Rukayah, S., Giovano, F. A., & Abdullah, M. (2023). The lost of old Demak Sultanate city pattern. *Journal of Architecture and Urbanism*, 47(2), 146-162.
<https://doi.org/10.3846/jau.2023.17855>
- Saada, N., & Magadlah, H. (2021). The meanings and possible implications of critical Islamic religious education. *British Journal of Religious Education*, 43(2), 206-217.
<https://doi.org/10.1080/01416200.2020.1785844>
- Saefudin, S. (2021). The shift in the tradition of Islamic education in Indonesia from The 19th century to the early 21st century. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 19(1), 1-23.
<https://doi.org/10.24090/ibda.v19i1.4391>
- Sebastian, L. C., & Alkaff, S. H. B. O. (2024). *Indonesia and Islam in transition*. Palgrave Macmillan.
<https://doi.org/10.1007/978-981-97-1140-6>
- Shidiq, T. A. (2021). *Perspektif pendidikan Islam: Dari filsafat hingga praktik*. Daqu Bisnis Nusantara.
- Sugiri, A. (2021). *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Abad VII Sampai Abad XV*. Penerbit A-Empat.
- Sulistiono, B. (2021). The History of Trade of the Nusantara in the 17th Century. *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 11(2), 157-170.
<https://doi.org/10.15548/khazanah.v11i2.656>
- Sumanti, S. T., Nunzairina, N., & Salminawati, S. (2024). The evolution of Islamic educational institutions in North Sumatra Indonesia. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 1-19.
<https://doi.org/10.31538/nzh.v7i1.4419>
- Suroso, A., Hendriarto, P., Kartika, M. R., Nashrulloh, G., Pattiasina, P. J., & Aslan, A. (2021). Challenges and opportunities towards Islamic cultured generation: socio-cultural analysis. *Linguistics and Culture Review*, 5(1), 180-194.
<https://doi.org/10.21744/lingcure.v5n1.1203>
- Yamashita, Y. (2022). Islam and Muslims in "non-religious" Japan: caught in between prejudice against Islam and performative tolerance. *International journal of Asian studies*, 19(1), 81-97.
<https://doi.org/10.1017/S1479591421000012>
- Yudha, G., Aziz, A., & Arini, I. (2024). History of economic trade in islam and its influence on international relations policy in the arabian peninsula. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(2), 94-106.
<https://doi.org/10.24042/tps.v20i2.28846>